

Rakyat Butuh Subsidi Migor Pemerintah Malah Ajak Rakyat Ikut Sumbangan Dana IKN

Luky - BOGOR.INDONESIASATU.CO.ID

Mar 25, 2022 - 15:03



Jajang Nurjaman, Koordinator CBA

JAKARTA,- Baik pemerintah dan masyarakat sedang mengalami kesulitan, rakyat begitu sengsara karena harga minyak goreng (Migor) meroket, sedangkan pemerintah teriak-teriak kekurangan dana pemindahan ibukota negara (IKN).

Berdasarkan data Kemendag, rata-rata harga Migor curah hari ini Rp18.100 dan

premium Rp 25.400 perliter. Beda jauh dengan harga Migor di Malaysia yang stabil dikisaran Rp 8.500 perliter.

Anehnya, bukannya fokus menangani harga Migor yang selangit, pemerintah malah ikut merengsek soal dana pemindahan Ibukota Negara. Seperti tidak punya rasa empati atas kesulitan ibu-ibu, pemerintah malah minta masyarakat buat patungan dana IKN.

Pemerintah seperti tidak ada puasnya membuat masyarakat jadi lebih miskin. Sebelumnya Presiden berjanji dana IKN tidak akan membebani APBN apalagi menyusahkan rakyat, hanya dibutuhkan sekitar Rp 93 triliun atau setara 20 persen dari total rencana dana awal Rp 466,9 triliun.

Janji itu kemudian berubah, penggunaan dana APBN jadi 53,5 persen dan anggaran IKN juga belum pasti, perkiraan akan meroket sampai Rp 700 triliun.

Jika pemerintah masih tetap ngotot untuk menggalang dana IKN dari masyarakat sebaiknya jangan menggunakan kata Nusantara karena bisa merusak citra agung nama Nusantara yang dihormati. Pakai saja nama koin untuk Jokowi sebagai pemimpin negara atau koin untuk Luhut sebagai penanggung jawab investor yang gagal menarik investor untuk IKN.

Jokowi juga jangan cuma meminta sumbangan dari rakyat yang sedang mengalami kesulitan karena pandemi dan harga Migor yang meroket. Lebih baik Jokowi meminta sumbangan dari pejabat yang harta kekayaannya terus meroket di tengah pandemi, atau para pengusaha kelapa sawit yang semakin tajir di bulan-bulan ini.

Contohnya, pejabat yang harta kekayaannya terus naik di tengah pandemi, seperti Luhut Binsar Pandjaitan yang katanya sangat dermawan sampai-sampai banyak menyumbang alat PCR. Atau 500 pengusaha kelapa sawit yang menguasai 8,5 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit.

Para pengusaha ini layak dimintai sumbangan karena semakin tajir melintir berkat lahan yang sebenarnya milik negara.

Jika tidak cukup juga, patungan koin dari masyarakat dan pejabat serta pengusaha tajir melintir. Pemerintah bisa kerja sama dengan KPK dan aparat penegak hukum untuk kembali membuka kasus-kasus besar, banyak kotak pandora kasus korupsi yang bisa bermanfaat bagi APBN, seperti kasus kardus durian dan sebagainya.

25 Maret 2022

Sumber: Jajang Nurjaman, Koordinator CBA